



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-894/01000/ES/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 17 September 2024

Yth. Wali Kota Bima
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kota Bima**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kota Bima**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kota Bima** tahun 2024 adalah **2,44** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kota Bima**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kota Bima**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam

Negeri.



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kota Bima



BADAN PUSAT STATISTIK

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidenzia litas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Validata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Catatan:

■ Domain ■ Aspek ■ Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kota Bima adalah:

- Pengumpulan Data Dalam Rangka Pemutakhiran Keluarga Kota Bima, Tahun 2023
- Pengumpulan Data dan Penandaan Ternak Kota Bima, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,22
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,11
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,35
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,22
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,44

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain



Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,40
Akurasi	16%	2,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	2,67
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,00
Pengumpulan Data	26%	2,00
Pemeriksaan Data	21%	1,50
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,50
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,50
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,99

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain



KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Bima telah mencapai predikat baik. Sudah ada kebijakan SDI berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor 100.3.4/04.1/I/2024 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Kegiatan Statistik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. Kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di lingkup Pemerintah Kota Bima.
- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor 100.3.4/04.1/I/2024 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Kegiatan Statistik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kota Bima sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional, Interoperabilitas dan Kode Referensi. Disamping itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.

Kekurangan:

- Belum seluruh aspek pada Domain Prinsip SDI mencapai predikat memuaskan atau belum seluruh indikator berada pada tingkat kematangan optimum.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan setiap aspek Domain Prinsip SDI untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Relevansi terkait Proses Identifikasi Kebutuhan Data, Penerapan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Penjaminan Aktualitas Data dan Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data Untuk



Pengguna Data, dan Akses Media Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Seluruh produsen data sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam dokumen kebijakan berupa SOP dari Walidata tanggal 2 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Bima Satu Data dan SOP tentang Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Bima dengan nomor 555/11/diskominfotik/I/2023.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna, Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data berada pada predikat cukup, sedangkan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi Statistik terkait Konsistensi Statistik masih berada pada predikat kurang.
- Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna, Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator-indikator tersebut.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi sebagai pedoman seluruh produsen data untuk melaksanakan penjaminan kualitas data yang dihasilkan.
- Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data, dan Akses Media Penyebarluasan Data untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Seluruh produsen data sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam dokumen kebijakan berupa SOP dari Walidata tanggal 2 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Bima Satu Data dan SOP tentang Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Bima dengan Nomor 555/11/diskominfotik/I/2023. Seluruh produsen data telah menerapkan manajemen rilis produk statistik ke pengguna,



mulai dari penyusunan hingga penyebarluasan produk statistik melalui portal data Pemerintah Kota Bima.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data terkait pengolahan data berada pada predikat cukup, sedangkan penerapan Aspek Pemeriksaan Data terkait analisis data masih berada pada predikat kurang.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator-indikator tersebut.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data sebagai pedoman seluruh produsen data untuk melaksanakan Proses Bisnis Statistik yang dihasilkan dan diterapkan oleh seluruh produsen data.
- Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan Aspek Penyebarluasan Data untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Kolaborasi antar dinas di Kota Bima telah dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk secara formal, dibawah arahan Sekretaris Daerah dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima, serta keterlibatan aktif Walidata dan Pembina Data dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, Pemerintah Kota Bima telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS secara formal.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas dan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel berada pada predikat Cukup. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Penjaminan Netralitas, Objektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik,



Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data, Penyelenggaraan Forum Satu Data, dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, akan tetapi masih menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda. Belum terdapat analisis kebutuhan pegawai di bidang statistik dan manajemen data, akan tetapi sudah ada pemenuhan kebutuhan pegawai dibidang statistik, serta belum diterapkan berdasarkan SOP yang terperinci mengenai hal diatas, walaupun Penyajian Data telah diupload pada website Satu Data Kota Bima.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Bima perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut.
- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu proses bisnis terkait penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi agar menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan yang memunculkan kebutuhan SDM Bidang Manajemen Data. Manajemen data berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
- Walidata perlu menjalankan tugasnya yang belum dilakukan, seperti menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Kota Bima. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Pemerintah Daerah Kota Bima telah memanfaatkan statistik dasar dan statistik sektoral pada perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan untuk kepentingan pemerintah. Hal ini tertuang dalam dokumen Laporan LPPD Pemerintah Kota Bima tahun 2023.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh walidata untuk kepentingan pemerintahan daerah. Hal ini tertuang dalam SOP yang dikeluarkan oleh walidata tanggal 3 Januari 2023 dengan Nomor 555/11/diskominfotik/I/2023 tentang Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Bima, serta berdasarkan Portal Satu Data Kota Bima



Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait Sosialisasi dan Literasi Data Statistik, Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik masih berada pada predikat cukup. Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Pemanfaatan *Big Data* dalam kegiatan statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator tersebut.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun kebijakan/kaidah baku terkait sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna yang mengikat dan diterapkan oleh seluruh produsen data.
- Walidata perlu mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS, mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Kota Bima.
- Pemerintah Kota Bima perlu menyusun prosedur baku terkait perencanaan pembangunan statistik yang mengikat dan berlaku bagi seluruh produsen data.
- Pemerintah Kota Bima perlu memanfaatkan *Big Data* untuk menghasilkan data statistik pendukung dan perlu ditetapkan prosedur baku yang mengikat dan diterapkan oleh seluruh produsen data dan walidata di Kota Bima.
- Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.





TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	2,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	1,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
Proses Bisnis Statistik	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	2,00
Perencanaan Data		Tingkat Kematangan Pendefinisan Kebutuhan Statistik	33%	2,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelembagaan	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	2,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	2,00
		Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan	34%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kebijakan		Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	2,00
		Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	2,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli